

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK KORBAN KONTEN PORNOGRAFI

Tindak pidana menjadi bagian dan perhatian yang penting dalam hubungannya dengan perkembangan di masyarakat sehubungan dengan kemajuan teknologi informasi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah mengatur subjek hukum pidana pada perbuatan pidana pornografi yang berkaitan dengan sistem pemidanaan maupun tujuan pemidanaan. Proses menyelesaikan kasus pornografi dimana anak sebagai korbannya, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih memberikan efek jera bagi pelakunya. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode pengumpulan data literatur kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian diketahui bahwa dasar hukum tentang tindak pidana pornografi dalam penelitian ini diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pornografi berdasarkan Pasal 282 ayat (1) KUHP. Perlindungan hukum terhadap anak korban pornografi yaitu dilakukan dengan pendekatan psikologis dan sosiologis.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Anak, Pornografi**

## **ABSTRACT**

### **RESPONSIBILITY LEGAL REVIEW CRIMINAL ACTIONS AGAINST CHILDREN VICTIMS OF PORNOGRAPHIC CONTENT**

*Criminal acts become an important part and concern in relation to developments in society in connection with advances in information technology. Law Number 44 of 2008 concerning Pornography has regulated the subject of criminal law on pornographic criminal acts related to the criminal system and the purpose of punishment. The process of resolving pornography cases where children are victims, requires a criminal law policy that provides a more deterrent effect for the perpetrators. This research method is normative juridical with library research data collection method. The results of the study note that the legal basis for pornography in this research include the Criminal Code, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography, Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. The responsibility of the perpetrators of the crime of pornography is based on Article 282 paragraph (1) of the Criminal Code. Legal protection for child victims of pornography is carried out with a psychological and sociological approach.*

**Keywords: Crime, Children, Pornography**

